



## Konsep Pengembangan Ekonomi Santri Menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansi di Era Modern

Khoirurrajiin<sup>1</sup>, Bambang Ismanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAI Agus Salmi Metro, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

\* CORRESPONDENCE: ✉ [Masri.jadidah@gmail.com](mailto:Masri.jadidah@gmail.com)

### Abstrak

Era millennial merupakan kelanjutan dari era global yang telah menimbulkan tantangan-tantangan baru yang harus diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam penggunaan digital technology yang melampaui era komputer, maka kedaan telah mengundang sejumlah pakar untuk angkat bicara dan sekaligus menawarkan sejumlah pemikiran dan gagasan. Pendidikan Islam dengan beragam jenis dan jenjangnya, mulai pesantren tradisional hingga modern. Pesantren sebagai bagian integral masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi. Peran ini memang tidak mudah bagi pesantren yang selama ini yang lebih konsentrasi pada bidang keagamaan daripada bidang sosial kemasyarakatan dalam bidang ekonomi. Pesantren mempunyai peran dalam membentuk tatanan masyarakat muslim yang ideal. Potensi yang bisa didapatkan dari pesantren untuk mengembangkan ekonomi adalah : (1) pesantren sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi, (2) pesantren sebagai laboratorium bisnis syariah, (3) pesantren sebagai pusat pembelajaran ekonomi.

### Article Info

#### Article History

Received : 15-11-2021,

Revised : 10-12-2021,

Accepted : 15-12-2021

#### Keywords:

Keywords ; pengembangan ekonomi

Keywords ; ekonomi santri

## PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Pemerintah selama ini jarang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren, karena dianggap lembaga pendidikan tradisional yang tidak mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebagian besar pesantren menganggap bahwa ekonomi bukanlah urusan pesantren karena urusan ekonomi merupakan persoalan duniawi, sehingga tidak perlu diperhatikan secara serius.

Fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of exellent*), sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Melihat hal seperti itu, sebenarnya pesantren dapat berperan sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat menjadi dinamisor dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi.

Di dalam Islam, ekonomi merupakan *wasilah* bukan *maqashid*, jadi ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sesuai dengan yang

diajarkan Islam bahwa harta dan kegiatan ekonomi merupakan amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda, pemilik hakiki kekayaan. Karena itu, orang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka melalui jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti cara sedekah bukan dengan cara ribawi karena sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta kekayaan. Dari sini sebenarnya pesantren mempunyai kekuatan yang bisa dimanfaatkan pesantren untuk melakukan pemberdayaan dalam ekonomi kerakyatan..

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Para ahli menggunakan kata “masyarakat” untuk menunjuk makna “ummat”. Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Oxford English Dictionary, kata empower memiliki dua arti, yaitu : (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli langsung memakai frase “pemberdayaan ekonomi” ketika menerangkan hal ini.

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk memperoleh gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya. Definisi ini banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah.

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan ada sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau renaissance, ketika banyak pihak mulai mempertanyakan determinasi gereja. Jika kemunculan ide pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat yang menyatakan bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata “power” yang berarti “kekuasaan” atau “keberdayaan”. Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua.

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Konsep pemberdayaan ekonomi lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas (yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi). Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut : (1) bahwa pemusatan kekuasaan terbangun dari pusat penguatan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran; (3) kekuasaan akan menghasilkan bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu : masyarakat berdaya, dan masyarakat tunadaya.

### **Biografi Ibnu Taimiyah**

Ibu Taimiyah adalah salah satu ulama besar yang paling dikenal dengan gelar Syaikhul Islam yang artinya orang yang menjadi panutan dan rujukan bagi kaum Muslim karena ilmu dan hikmahnya.

Di masa Daulah Utsmaniyyah, penguasa yang mengambil alih kekuasaan dari Bani Mamluk di akhir zaman hidup Ibnu Taimiyah, gelar ini diberikan pada semua mufti resmi negara.

Ibnu Taimiyah lahir di tahun 1263, di abad ke-13 Masehi. Jauh sebelum Adam Smith, yang lahir di tahun 1723, di abad ke-18 Masehi mengutarakan pemikiran tentang konsep pasar bebas dan the invisible hand, Ibnu Taimiyah sudah membahas tentang mekanisme pasar.

Beliau sangat meyakini bahwa permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi harga. Makin tinggi permintaan dan makin sedikit penawaran dan makin kecil permintaan, akan menyebabkan turunnya harga.

Pemikiran beliau tidak hanya terbatas pada mekanisme pasar saja, melainkan beliau juga membahas tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh Pemerintah di dalam mengatur ekonomi. Secara tegas, beliau memberikan pernyataan pendapat bahwa kolusi harga oleh pembeli dan penjual tidak disukai di dalam Islam, dan beliau juga menyatakan wajib bagi Pemerintah untuk memberantas monopoli pasar jika hal tersebut terindikasi terjadi di dalam wilayah kekuasaan mereka.

Pesantren merupakan institusi yang melekat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem sosial masyarakat Muslim Indonesia. Makin meluasnya praktik ekonomi santri di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari proses rekayasa sosial untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam. Melalui seperangkat sumber daya yang dimiliki, maka

pesantren pada dasarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah, sebagaimana yang akan dideskripsikan di dalam tulisan artikel ini.

### **Genealogi Pesantren**

Kata pesantren memang sudah menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai bentuk. Pesantren pada dasarnya berasal dari kata santri. Kata santri berasal dari kata *sasthra/i* yang diambil dari bahasa Tamil India, dan mempunyai makna orang yang pakar di bidang kitab suci. Kata santri kemudian diberi prefik *pe-* dan akhirnya *-an*, sehingga menjadi kata pesantren, yang maknanya adalah peserta didik yang tinggal di pemondokan atau asrama. Nurcholis Madjid, menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren. Sedangkan kata “santri”, diduga berasal dari bahasa *sanskerta* “*sastri*” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “*cantrik*” yang berarti seorang yang mengikuti gurunya kemana pun pergi.

Pesantren kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan yang memberikan porsi pendidikan agama dalam porsi yang besar. Lalu sebagaimana sebelumnya, bahwa kata santri yang berasal dari bahasa India juga menunjukkan bahwa pendidikan pesantren menurut corak dan bentuknya yang asli adalah suatu sistem pendidikan yang asalnya dari India. Sebelum masuknya Islam ke nusantara, pesantren yang ada di Indonesia adalah tempat pendidikan yang digubakan secara umum untuk pengajaran agama Hindu dan Budha. Namun, pola pendidikan pesantren semacam ini juga dapat ditemukan di beberapa kawasan Timur Tengah, seperti *an-Nidzamiyah* di mesir, dan *al-Azhar* di Mesir (Steenbrink, 1994).

Tidak akan ada pesantren jika tidak ada kyai didalamnya. Sebagai seorang yang disegani karena memiliki ilmu agama yang tinggi, seorang kyai memeloori pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sennuah pesantren. Menurut Hasbullah, sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung ada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta keterampilan kyai. Daam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren (Hasbullah, 1999: 144)..

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Santri dan Pemberdayaan Ekonomi**

Di pesantren tertentu, santri memang dibekali dengan berbagai keterampilan / keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan dan berdagang. Semua itu dilakuakn oleh oihak pesantren sebagai upaya untuk membekali para santri dengan berbagai skill keahlian atau setidaknya menyiapkan mental dan keterampilan para santri supaya kelak ketika keluar dari pesantren sudah bisa mandiri. Jadi, wajar jika pesantren berusaha mengembangkan diri dengan melakukan suatu tindakan nyata (*dakwah bil bal*) pada masyarakat di sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi.

Berangkat dari kesadara bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa pesantren mencoba membekali santri dengan keterampilan di bidang pengembangan ekonomi. Artinya santri

yang dihasilkan harapannya mempunyai pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal untuk mencari pendapatan hidup ketika keluar dari pesantren. Ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren; *pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya, seorang kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santri untuk mengerjakan. Seperti kasus di Pandeglang, yaitu pesantren Nurul Hidayah Cilaja kec. Pandeglang.

*Kedua*, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Misalnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Seperti pesantren Sidogiri yang mempunyai beberapa usaha mulai dari swalayan, toko-toko kelontong yang hasilnya untuk pembiayaan pesantren. Jika di Bandung, kita semua tahu dengan Daarut Tauhid.

*Ketiga*, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai keterampilan tambahan. Pesantren Baitul Hamdi di Menes Pandeglang dapat dijadikan sampel pesantren dalam jenis ini, karena disana santri diajak untuk bertani, dan berkebun.

*Keempat*, usaha ekonomi untuk para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan bertujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dan pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah.

Upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan berbagai kenyataan yang bisa menjadi penghambat langkah tersebut. Salah satu contohnya adalah karena biasanya pesantren selalu menjadi tempat bagi keluarga dekat kyai, dari anak, cucu dan seterusnya atau biasa disebut *dzurriyah* kyai. Mereka kadang bertumpu secara ekonomis terhadap santri, apakah dalam bentuk penyediaan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari, atau lainnya.

Di banyak pesantren selalu terdapat kios-kios kecil milik keluarga kyai yang terkadang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Inilah sulitnya ketika pesantren kemudian mencoba untuk memusatkan kegiatan ekonomi dalam satu lembaga. Kegagalan koperasi Pondok pesantren pada dasarnya adalah karena usaha itu dihadang oleh kepentingan-kepentingan internal. Selain itu, harus diakui bahwa

manajemen ekonomi pesantren juga relatif kurang baik, bukan dari aspek kejujurannya tapi administrasinya.

Selain itu, kekurangan juga kerap tumbuh pada persoalan yang bersifat paradigmatik. Satu contoh misalnya nilai-nilai kemandirian yang dianut pesantren masih lebih menampakkan aspeknya yang bersifat individual, atau sangat lokal dan belum menjadi sikap sosial kemasyarakatan yang transformatif. Pengabdian dan pengembangan masyarakat yang masih terkesan parsial dan melulu ditekankan pada aspek pengembangan keilmuan keagamaan murni. Sebagai konsekuensi pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren belum disentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk penyatuan yang integral dan eksplisit ke dalam kurikulum yang dikembangkan pesantren. Tradisi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri untuk memetamorfosis sebagai *civil society* yang berkeadaban, universal dan berorientasi jauh ke depan.

Dari hal tersebut, maka yang harus diperhatikan dalam penguatan kelembagaan itu adalah, *pertama*, menganalisis kebutuhan subek sasaran ekonomi atau yang disebut sebagai need-assessment. Analisis kebutuhan diperlukan agar apa yang akan dipasarkan itu memang menjadi kebutuhan sasaran. Pada tahap awal tentunya harus dibidik kebutuhan-kebutuhan santri dan masyarakat sekitar, agar produk yang ditawarkan akan segera diperoleh nilai timbal balik. Baru bisa bergerak ke sektor lain, jika kondisi memang sudah memungkinkan. *Kedua*, melakukan analisis potensi SDM untuk kegiatan (ekonomi) tersebut. Apakah sudah ada SDM yang bisa dan mampu untuk menjadi agen bagi pengembangan kelembagaan ekonomi tersebut? Pesantren sesungguhnya kaya dengan SDM yang berkualitas, hanya saja belum sidentuh dengan kekautan maksimal untuk itu. *Ketiga*, memetakan kebutuhan dan potensi untuk dijadikan sebagai rancangan program yang memadai. *Keempat*, melaksanakan program dengan memperhatikan jaringan kerja atau networking yang telah dimiliki oleh pesantren. *Kelima*, melakukan evaluasi kinerja apakah sudah ada kemajuan atau belum.

Strategi tersebut sebenarnya bisa diwujudkan dalam berbagai ranah. Karena pesantren pada umumnya ada di daerah pedesaan, maka strategi yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah tidak jauh dari bidang tersebut. Sunyoto Usman memberikan beberapa alternatif wilayah yang bisa menjadi wilayah garapan pesantren dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari hal itu, ada beberapa pendekatan yang memungkinkan bisa diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, yaitu (1) upaya pemberdayaan ekonomi pesantren harus terarah kepada pesantren yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin dan lemah, (2) pendekatan kelompok unit usaha untuk memudahkan pemecahan masalah

yang dihadapi bersama-sama, (3) pendampingan kepada mereka selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok yang dilakukan oleh pendamping yang sifatnya lokal, teknis, dan khusus.

Sebenarnya pendidikan wirausaha bukanlah sesuatu yang asing dalam pesantren. Terutama tentang konsekuensi dari pendidikan semacam itu yaitu etos kerja keras. Hal semacam itu selalu menjadi tekanan pokok dalam pendidikan di pesantren. Akan tetapi pendidikan kepengusahaan (wirausaha) tersebut tidak terkoordinasi dan tidak direncanakan dan untuk itu mestinya harus dibuat kerangkanya. Akibatnya akan keluar usahawan-usahawan yang mencari-cari jalan sendiri. Mereka akan menjadi usahawan-usahaawan yang otodidak, yang tidak mendekati masalahnya dari segi-segi ilmiah tetapi berdasarkan intuisi. Dan akhir-akhir ini juga ada upaya memasukkan pendidikan keterampilan ke dalam pesantren. Usaha semacam itu adalah usaha yang terpuji dan bukanlah suatu yang buruk dalam dirinya.

### **Potensi Pendidikan Islam Menghadapi Era Modern**

Terdapat sejumlah potensi yang dimiliki pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan di era modern yang ciri-ciri serta hubungannya dengan era sebelumnya telah dikemukakan di atas. Potensi yang dimiliki pendidikan Islam dalam menghadapi era modern antara lain terkait dengan sifat karakter pendidikan Islam yang holistik, komprehensif, progresif, dan responsive. Pendidikan Islam dalam penyiapan generasi unggul, contoh dan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan dalam berbagai situasi dan kondisi, pengalaman pendidikan Islam dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, pengalaman pendidikan Islam dalam menyiapkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, dan perhatian pendidikan Islam pada manajemen modern. Berbagai potensi ajaran Islam dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **1. Sifat Karakteristik Pendidikan Islam**

Pada dasarnya sifat dan karakter pendidikan Islam adalah sama dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam, yaitu ajaran yang didasarkan pada teologi *humanism teo-prophetik*. Dengan teologi ini, maka ajaran Islam selain mendasarkan ajarannya pada ajaran Tuhan yang terdapat di dalam al-Quran, dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam hadistnya (ucapan, perbuatan dan ketetapan), juga berdasarkan pendapat akal pikiran yang sehat yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan al-Hadist. Hal-hal baru yang dihasilkan era modern saat ini yang sejalan dengan ajaran Islam dapat diterima. Sikap yang dinamis, inovatif, kreatif, dan berani keluar dari kebiasaan lama. Di dalam al-Quran dan al-Hadist terdapat nama-nama Asmaul Husna yang menurut hadist riwayat Turmuzi, berjumlah 99 atau 100 misalnya, dan kita diminta oleh Allah dan Rasul-Nya agar meniru

sifat-sifat-Nya, misalnya sifat al-mushawwir:membentuk atau merubah sehingga keadaan berbedanya dengan sebelumnya (dinamis), sifat-Nya al-Khaliq:menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya (inovatif), sifat al-Baari:memberikan keleluasaan untuk melakukan sesuatu tanpa terikat pada contoh sebelumnya. Selama ini, Asmaul Husna dipahami secara mistik, yaitu dengan mengharapkan keberkahan, misalnya bahwa dengan membacanya akan memperoleh syafa'at (pertolongan) di akhirat kelak, atau dilapangkan dalam kuburnya dan lainnya.

Islam mengakui adanya waktu yang berbeda-beda, kondisi dan situasi yang ada di dalamnya serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya, ada pada penggunaan kata al-ashr diartikan waktu, padahal sebenarnya kata al-ashr pada makna aslinya bukan waktu, tapi perasaan. Penggunaan kata al-ashr untuk waktu dimaksudkan agar waktu tersebut digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana halnya buah-buahan yang diambil saripatinya dengan cara diperas. Karena pentingnya memanfaatkan waktu secara produktif untuk kebaikan, makan di kalangan para sahabat ada sebuah tradisi, yaitu apabila berpisah dari suatu pertemuan, maka mereka mengakhirinya dengan membaca surat surat Al-ashr.

Ada pesan dari Umar bin Khatab pada para orang tua yang berbunyi : *Didiklah anak-anakmu sekalian, karena merak adalah makhluk yang akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian.* Berdasarkan petunjuk Umar bin Khatab, akan zaman atau era modern dengan ciri-ciri dan tantangan-tantangannya sudah harus diberitahukan pada para peserta didik, dan sekaligus memberitahukan tentang wawasan, ilmu, keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki agar mereka dapat merubah tantangan-tantangan yang dihadapinya menjadi peluang serta mampu menggunakannya dengan tepat.

## **2. Perhatian Pendidikan Islam Terhadap Bidang Entrepreneurship**

Hal menarik dari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam termasuk yang berada di Pondok Pesantren yang tergolong modern tersebut statusnya swasta. Kemajuan, nama besar, kepercayaan masyarakat, jenis dan jenjang program pendidikan yang beragam, area kampus yang luas, infra struktur, sarana, prasarana, fasilitas yang lengkap dan modern, manajemen pengelolaan yang profesional, kondisi keuangan yang sehat dan kuat, kemasan, branded dan pemasaran yang modern, mereka capai dengan usaha dan kerja keras yang tidak mengenal lelah, serta keuletan dan keberanian dalam mengambil keputusan dengan risiko yang diperhitungkan. Adanya kemajuan yang dicapai Lembaga pendidikan Islam tersebut adalah kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan atau wiraswasta). Wiraswasta terdiri dari tiga kata : *wira*, *swa*, dan *sta*, masing-masing berarti : *wira* adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, pahlawan, pendekar kemajuan, dan

memiliki keagungan watak; *swa* artinya sendiri; dan *sta* artinya berdiri. Jadi secara etimologi, wiraswasta berarti keberanian, keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri (Alma, 2011, 17). Selain itu, seorang wiraswasta adalah orang yang memegang prinsip integritas, kejujuran, keadilan, martabat manusia, komitmen, tanggung jawab sosial, dan kebaikan umum (Byron, 2010, 63-219).

Dengan memperhatikan catatan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kemajuan yang terdapat Pendidikan Islam sebagaimana yang terjadi di Pesantren, menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya telah memiliki wawasan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai dan sikap kewirausahaan, juga telah mempraktikannya. Sikap kewirausahaan ini sejalan dengan sikap generasi millennial sebagaimana tersebut di atas, yaitu dinamis, inovatif, kreatif, dan berani keluar dari kebiasaan lama.

Dengan begitu dapat dikemukakan, bahwa pendidikan Islam akan memiliki peran besar dalam menyiapkan generasi yang akan siap menghadapi era modern, apabila Lembaga Pendidikan Islam tersebut ikut serta membentuk mental kewirausahaan.

## **SIMPULAN**

Pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan (moral force) maupun yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pesantren.

1. mempersiapkan para santri dengan memberikan bekal keahlian tertentu, seperti pertanian, cara berdagang, dan lainnya. Sehingga ketika keluar dari pesantren mempunyai bekal untuk bekerja.

2. Menanamkan jiwa wirausaha pada santri, dengan memberikan wawasan kepada mereka sejak dini bahwa bekerja merupakan perintah agama. Karena mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama.

3. Perlu adanya pemahaman dari kalangan pesantren bahwa persoalan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, juga merupakan tanggung jawab pesantren sebagai bagian dari *hablum min al anas* dan *dakwah bil bal*.

Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian.

Dengan sumber daya yang dimiliki pesantren sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia, maka pesantren sangat berpotensi untuk memainkan perannya dalam mengembangkan ekonomi.

Berdasarkan dari uraian dan analisa tentang era modern yaitu millennial, sebagai berikut :

1. Era millennial adalah era yang ditandai dengan generasi yang mempunyai ciri-ciri : (1) suka dengan kebebasan; (2) senang melakukan personalisasi; (3) mengandalkan kecepatan informasi dan instan; (4) suka belajar; (5) bekerja dengan lingkungan inovatif; (6) aktif berkolaborasi; (7) hyper technology (Tapscott, 2008). (8) critical, yaitu terbiasa berpikir out of the box, kaya ide dan gagasan; (9) confidence, yaitu mereka sangat percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat tanpa ragu-ragu; (10) connected, yaitu merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti; (11) berselancar di media sosial dan internet (Farouk, 2017, 7). (2) sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial, mereka menjadi pribadi yang malas, tidak mendalam, tidak membumi, atau tidak bersosialisasi; (13) cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong-royongan, kehangatan lingkungan dan kepedulian sosial; (14) cenderung bebas, kebarat-baratan dan tidak memperhatikan etika dan aturan formal, adat istiadat, serta tata krama.

2. Baik secara normative, filosofis dan historis, pendidikan Islam siap menghadapi era millennial. Yakni siapa menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan di era millennial, dan sekaligus dapat mengatasi berbagai problema kehidupan yang timbul di era tersebut.

3. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi awal pada khususnya, dan mengatasi problema umat pada umumnya adalah karena ketepatan beliau dalam memotret permasalahan problema umat serta menawarkan cara pemecahannya yang strategis, serta kemauan yang kuat untuk mewujudkannya, yang ditopang oleh akhlak mulia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta, LKiS, 1999
- Ali Murtadlo, Pesantren dan Pemberdayaan ekonomi ((Studi Kasus Pesantren Baitul Hamdi dan Pesantren Turus di Pandeglang) Di akses dari [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). Dikutip pada 20 mei 2011
- Amalia, Euis, 1996. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Grama Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing.
- Amin Haidari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, IRD Press, Jakarta, 2004
- Antonio, Muh. Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktek, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Al-Bahi, Manhaj al-Qur'an fi Tawtir al-Mujtama', Dar al-Fikr, Beirut 1974
- Dahlan, Azis dkk. 2003. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Van Houve.
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT. Refika Aditama. 2005
- Islahi, A.A. , 1997. Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kuswanto, Adi, 1993. Pengantar Ekonomi, Cet. Ke-3. Depok, Gunadarma.
- Mardi Yatmo Hutomo. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi. Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta. Di akses dari [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). Dikutip pada 10 Januari 2011
- Ibid.,
- Usman, Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Shiddiqi, M. Nejatullah, 1996. Kegiatan Ekonomi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Taimiyah,

Ibnu, 1993. Majmu' Fatawa, Vol. 29. Riyad: Matabi' Riyad.

Thaha, Ahmadie. 2007. Ibnu Taimiah Hidup dan Pemikirannya. Surabaya: Bina Ilmu Offset

Jabali, Fu'ad, dan Jamhari, (2003). IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia, Jakarta: UIN Jakarta Press, 1424 H./2003 M. cet. I.

Al-Kailany, Majid Irsan, al-Fikry al-Tarbawiy ind Ibn Taimiyah, Madinah al-Munawwarh: Maktabah Dar al-Turats, tp. Th.. Lenggulung, (1986), Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Alhusna, cet. I.

Situs internet :

<https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/ekonomi-syariah/serial-sang-pemikir-ekonomi-syariah-ibnu-taimiyah/?amp>.